



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jumat, 12 September 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI

Akhirnya Pemkab dan DPRD Sependapat

Perda PAK 2025 Resmi Dileged

SIDOARJO, SURYA - Perubahan anggaran keuangan (PAK) atau perubahan APBD 2025 Kabupaten Sidoarjo resmi dileged oleh DPRD Sidoarjo setelah menggelar rapat paripurna bersama Bupati Sidoarjo, Kamis (11/9). Raperda PAK 2025 sudah menjadi perda, tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Artinya, DPRD dan Pemkab Sidoarjo sudah sepakat soal pengesahan Perda PAK 2025.

Beda dengan sebelumnya, kalangan eksekutif meyakini PAK tidak bisa disahkan menjadi perda karena LPP (laporan pertanggungjawaban penggunaan) APBD berbentuk perkara (peraturan kepala daerah) ditolak oleh DPRD Sidoarjo. PP Nomor 12 Tahun 2019 menyebut bahwa Perda PAK dapat disahkan setelah ada Perda LPP APBD tahun sebelumnya.

Ini yang beda tafsir. Ada yang menyebut bahwa LPP APBD harus dalam bentuk perda sebagai persyaratan Perda PAK, ada yang menganggap bahwa LPP APBD dalam bentuk perkara juga tetap bisa untuk pengesahan Perda PAK. Nah, DPRD Sidoarjo yang meyakini bahwa LPP APBD dalam bentuk perkara juga tetap bisa dijadikan persyaratan pengesahan Perda PAK.

"Semua sudah berjalan, dan sudah ditandatangani, artinya sudah ada kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif terkait Perda PAK 2025. Selanjutnya, tiga hari ke depan eksekutif menyerahkan ke gubernur untuk evaluasi," kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nashih usai paripurna.

Menurutnya, gubernur punya waktu sekitar 15 hari untuk menyampaikan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, jika ada perubahan atau petunjuk-petunjuk terkait PAK itu, Pemkab dan DPRD tinggal melakukan penyesuaian.



SETUJU PERDA PAK - Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan para pimpinan DPRD Sidoarjo saat menandatangani persetujuan pembentukan Perda PAK 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9).

Bagaimana dengan persoalan beda pendapat dan beda tafsir yang terjadi? Menurut Nashih, secara regulasi memang diperbolehkan melanjutkan proses pembahasan dan pengesahan PAK ini. "Kami juga sudah berkonsultasi ke Kemendagri dan ke provinsi, prinsipnya memang dibolehkan tetap jalan. Yang jelas, ini terkait pembangunan di Kabupaten Sidoarjo agar tetap bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Tak jauh beda yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Subandi. Usai menghadiri rapat paripurna itu, Subandi menyatakan bahwa selanjutnya pihaknya menyerahkan Perda PAK 2025 ini ke Gubernur Jatim. "Selanjutnya, kita akan jalankan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Timur. Yang penting, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus bisa tetap berjalan dengan baik," katanya.

Terkait proses pembahasan Raper-

da PAK 2025, diikutinya sebelum LPP APBD 2024 ditolak oleh dewan, Pemkab sudah mengirimkan pengajuan pembahasan PAK ke DPRD. Sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dan sekarang digelar paripurna pengesahan raperda menjadi Perda PAK 2025. "Terkait LPP APBD 2024 yang ditolak, sebagaimana aturannya tidak bisa jadi perda, sehingga kita buatannya perkara," jawabnya.

Dalam perubahan APBD 2025 ditetapkan bahwa anggaran belanja daerah meningkat Rp 119 miliar. Dari sebelumnya Rp 5,947 triliun menjadi Rp 6,066 triliun. Menurut bupati, perubahan anggaran ini diikuti dengan pendapatan daerah. Nilainya bertambah sekitar Rp 48 miliar.

Subandi juga menyebut adanya penambahan anggaran pembiayaan daerah. Dari sebelumnya Rp 509 miliar menjadi Rp 618 miliar. (udf)

YPM Sepanjang Salurkan Bantuan untuk Palestina Rp 90 Juta

SIDOARJO - Keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Dana yang berhasil dikumpulkan melalui gerakan donasi bersama itu mencapai Rp 90 juta.

Ketua YPM Sepanjang, Ir. H. Ahmad Makki, MT., menyampaikan bahwa penggalangan dana dilakukan serentak oleh 21 lembaga pendidikan di bawah naungan YPM. Donasi tersebut berasal dari guru, siswa, mahasiswa, hingga dosen.

"Alhamdulillah, dana terkumpul Rp 90 juta. Dana tersebut kami salurkan ke NU-Care Lazису. Dan menurut informasi,

pada bulan September ini akan disalurkan langsung oleh Lazису ke Palestina," ujar Gus Makki, Kamis (11/9/25).

la menambahkan, aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar YPM terhadap sesama, khususnya rakyat Palestina.

"Semoga persaudaraan dan kepedulian dengan sesama semakin kuat, khususnya di keluarga besar YPM," tegasnya.

Sebagai informasi, YPM Sepanjang menaungi berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Playgroup, TK, SD, SMP-MTs, SMA-SMK, perguruan tinggi Universitas Ma'arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo. • Loe



MACET: Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Trosobo, Taman, Sidoarjo, Kamis (11/9).

Padat, Polisi Lakukan Rekayasa Jalan

TAMAN-Proyek pelebaran jembatan di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, membuat arus lalu lintas Surabaya-Mojokerto dan sebaliknya terganggu parah. Setiap hari, antrean kendaraan mengular panjang, terutama saat jam sibuk. Untuk mengurangi kepadatan, Unit Lantas Polsek Taman menerapkan pola rekayasa lalu lintas.

Jembatan yang berada di sisi barat Flyover Trosobo itu kini tengah dinonaktifkan dan ditargetkan rampung pada Jumat (28/11). Lebar jembatan yang semula hanya sekitar dua meter akan diperluas menjadi enam meter agar lebih layak menampung volume kendaraan yang padat setiap harinya.

Ke Halaman 10

Warga Keluhkan Parkir Tanpa Karcis di Pasar Sepanjang

Disperindag Temukan Bukti Pungli

SIDOARJO - Pengelolaan parkir di Pasar Sepanjang, Taman, memang keluhan warga. Sejumlah iklan masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo. Mulai dari petugas parkir tanpa seragam dan karcis, hingga penempatan kendaraan di area yang tidak semestinya.



GANGGU KENYAMANAN - Area parkir kendaraan bermotor di Pasar Sepanjang, Taman, Sidoarjo, Kamis (11/9). Warga melaporkan penataan parkir yang tidak sesuai standar.

Keluhan itu, kata Kepala Disperindag Sidoarjo Sulthon Hasan, sudah ditindaklanjuti. "Kami akan lakukan pemeriksaan ke lokasi. Kami akan lakukan sosialisasi penataan parkir di sana."

Kami dapat memang ada bukti parkir di sana tidak sesuai standar. Kami tindak lanjut," kata Sulthon Hasan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo.

Belanja Daerah Naik Jadi Rp 6,06 Triliun

SIDOARJO-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 2025 resmi mengalami perubahan. Pendapatan daerah naik dari Rp 5.428 triliun menjadi Rp 5.448 triliun, sedangkan belanja daerah bertambah dari Rp 5.947 triliun menjadi Rp 6.066 triliun.



NAIK: Bupati Sidoarjo, Subandi saat mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Sidoarjo



DARURAT: Penanganan tim medis PSC 119 Dinkes Sidoarjo.

PSC 119 Sidoarjo Terima 1.705 Panggilan Darurat

SIDOARJO - Selama enam bulan terakhir, Public Safety Center (PSC) 119 Sidoarjo menerima 1.705 panggilan darurat dari masyarakat. Laporan didominasi permintaan penanganan luka lintas hingga ada puhan telefon prank.

Bupati Subandi Ajak Perkuat Sinergi

SIDOARJO-Dandim 0815 Sidoarjo memi beraati. Letkol Inf Dedy Wahyu Widodo selaku Komandan Kodim 0815 Sidoarjo yang baru Letkol Csi Shohrin Setio Utomo. Ia berharap kedatangannya akan membawa energi baru

untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat. "Harapan kami kerja sama yang baik antara ini dapat semakin meningkatkan sinergi sebagai bentuk dukungan bersama kita untuk membangun Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, aman, dan sejahtera," ucapnya.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

LETKOL CZI SHOBIRIN SETIO UTOMO RESMI JABAT DANDIM 0816, BUPATI AJAK PERKUAT SINERGI

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Letkol Czi Shobirin Setio Utomo resmi menjabat Dandim 0816 Sidoarjo. Lulusan Akmil Magelang tahun 2005 itu menggantikan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo yang pindah ke Mabesad sebagai Pabandya I/Kompres Spaban III/Binteman Spersad. Rabu malam kemarin, (10/9), lepas sambut Komandan Kodim 0816 Sidoarjo digelar Kodim 0816 Sidoarjo di Jie Poek DW Resto Sidoarjo. Seluruh Forkopimda Sidoarjo hadir dalam kesempatan tersebut. Diantaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing serta Kajari Sidoarjo Zaidar Rasepta dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Darius Naftali.

Dalam sambutannya Bupati Sidoarjo H. Subandi mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0816 Sidoarjo yang baru Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Ia berharap kedatangannya akan membawa energi baru untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemer-

intah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

"Harapan kami kerjasama yang baik selama ini dapat semakin ditingkatkan sehingga bersama kita mampu menjaga kondusifitas wilayah serta mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, aman dan sejahtera," ucapnya.

Dikatakannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap menyambut Letkol Czi Shobirin Setio Utomo dengan tangan terbuka. Ia berharap kolaborasi dan sinergi Forkopimda Sidoarjo yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga.

"Kepada Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, kami siap menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi demi Kabupaten Sidoarjo yang semain baik dan bermartabat," ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Subandi juga mengucapkan terimakasih kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo atas pengabdianya selama ini bagi Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya dedikasi yang tinggi telah ditunjukkan



Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bagi kemajuan pembangunan Sidoarjo.

"Selama bertugas di Sidoarjo, beliau telah banyak berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban untuk mendukung program pembangunan daerah," ucapnya.

Bupati H. Subandi mengatakan kepindahan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bukan akhir dari kebersamaan menjaga Kabupaten Sidoarjo. Namun menjadi awal pengabdian yang terus berlanjut bagi bangsa dan

negara. Oleh karenanya jasa dan pengabdian Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo akan terus dikenangnya.

"Kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, kami doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan ditempat tugas yang baru," doanya.

Sementara itu Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Ia berjanji akan mengawal dan mendukung Kabupaten

Sidoarjo tetap sejuk. Menuju Sidoarjo sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan menjadi komitmen dukungannya selama menjabat.

"Dimana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung, kami berkomitmenkalau Sidoarjo baik, kami Kodim 0816 juga BAIK, Berani, Aktif, Inovatif, Kolaboratif dalam rangka mendukung dan mengawal Sidoarjo yang sejuk, apa itu SEJUK, Menuju Sidoarjo Sejahtera, Maju, Berkarakter dan berkelanjutan," ujarnya. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Akhirnya Pemkab dan DPRD Sependapat

► Perda PAK 2025 Resmi Digatedok

SIDOARJO, SURYA - Perubahan anggaran keuangan (PAK) atau perubahan APBD 2025 Kabupaten Sidoarjo resmi digatedok oleh DPRD Sidoarjo setelah menggelar rapat paripurna bersama Bupati Sidoarjo, Kamis (11/9). Raperda PAK 2025 sudah menjadi perda, tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Artinya, DPRD dan Pemkab Sidoarjo sudah sependapat soal pengesahan Perda PAK 2025.

Beda dengan sebelumnya, kalangan eksekutif meyakini PAK tidak bisa disahkan menjadi perda karena LPP (laporan pertanggungjawaban penggunaan) APBD berbentuk perkada (peraturan kepala daerah) ditolak oleh DPRD Sidoarjo. PP Nomor 12 Tahun 2019 menyebut bahwa Perda PAK dapat disahkan setelah ada Perda LPP APBD tahun sebelumnya.

Ini yang beda tafsir. Ada yang menyebut bahwa LPP APBD harus dalam bentuk perda sebagai persyaratan Perda PAK, ada yang menganggap bahwa LPP APBD dalam bentuk perkada juga tetap bisa untuk pengesahan Perda PAK. Nah, DPRD Sidoarjo yang meyakini bahwa LPP APBD dalam bentuk perkada juga tetap bisa dijadikan persyaratan pengesahan Perda PAK.

"Semua sudah berjalan, dan sudah ditandatangani, artinya sudah ada kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif terkait Perda PAK 2025. Selanjutnya, tiga hari ke depan eksekutif menyerahkan ke gubernur untuk evaluasi," kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih usai paripurna.

Menurutnya, gubernur punya waktu sekira 15 hari untuk menyampaikan hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, jika ada perubahan atau petunjuk-petunjuk terkait PAK itu, Pemkab dan DPRD tinggal melakukan penyesuaian.



SURYA/M TAUFIK

SETUJU PERDA PAK - Bupati Sidoarjo Subandi (kiri) dan para pimpinan DPRD Sidoarjo saat menandatangani persetujuan pembentukan Perda PAK 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9).

Bagaimana dengan persoalan beda pendapat dan beda tafsir yang terjadi? Menurut Nasih, secara regulasi memang diperbolehkan melanjutkan proses pembahasan dan pengesahan PAK ini. "Kami juga sudah berkonsultasi ke Kemendagri dan ke provinsi, prinsipnya memang dibolehkan tetap jalan. Yang jelas, ini terkait pembangunan di Kabupaten Sidoarjo agar tetap bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Tak jauh beda yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo, Subandi. Usai menghadiri rapat paripurna itu, Subandi menyatakan bahwa selanjutnya pihaknya menyerahkan Perda PAK 2025 ini ke Gubernur Jatim. "Selanjutnya, kita akan jalankan sebagaimana arahan Gubernur Jawa Timur. Yang penting, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus bisa tetap berjalan dengan baik," katanya.

Terkait proses pembahasan Raper-

da PAK 2025, diikutinya sebelum LPP APBD 2024 ditolak oleh dewan, Pemkab sudah mengirimkan pengajuan pembahasan PAK ke DPRD. Sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pembahasan dan sekarang digelar paripurna pengesahan raperda menjadi Perda PAK 2025. "Terkait LPP APBD 2024 yang ditolak, sebagaimana aturannya tidak bisa jadi perda, sehingga kita buat perkada," jawabnya.

Dalam perubahan APBD 2025 ditetapkan bahwa anggaran belanja daerah meningkat Rp 119 miliar. Dari sebelumnya Rp 5,947 triliun menjadi Rp 6,066 triliun. Menurut bupati, perubahan anggaran itu diikuti dengan pendapatan daerah. Nilainya bertambah sekitar Rp 48 miliar.

Subandi juga menyebut adanya penambahan anggaran pembiayaan daerah. Dari sebelumnya Rp 509 miliar menjadi Rp 618 miliar. (uif)



✓ Pelebaran Jembatan Raya Trosobo, Lalu Lintas jadi Macet Parah

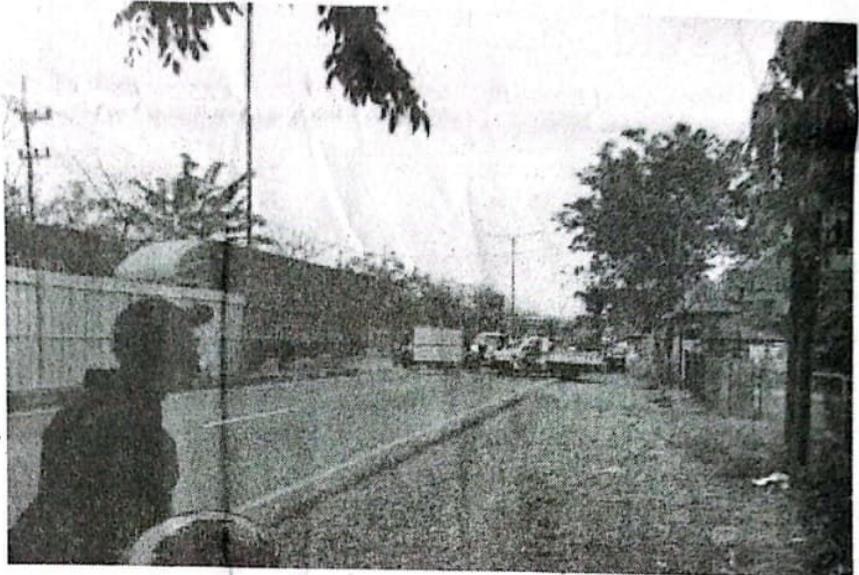
Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Proyek pelebaran jembatan di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, membuat arus lalu lintas Surabaya–Mojokerto dan sebaliknya tersendat parah. Setiap hari, antrean kendaraan mengular panjang. Terutama saat jam sibuk. Untuk mengurangi kepadatan, Unit Lantas Polsek Taman menerapkan pola rekayasa lalu lintas.

Jembatan yang berada di sisi barat Flyover Trosobo itu kini tengah direnovasi dan ditargetkan rampung pada Jumat (28/11). Lebar jembatan yang semula hanya sekitar dua meter akan diperluas menjadi enam meter agar lebih layak menampung volume kendaraan yang padat setiap harinya. “Jalan Raya Trosobo terpantau tidak bergerak, dari tadi macet,” kata pengendara motor, Budi, Kamis (11/9).

Kemacetan mengular, baik dari arah Surabaya maupun Mojokerto. Meskipun ia sudah berangkat untuk bekerja lebih awal, namun tetap terjebak kemacetan di kawasan Trosobo, Taman. Selain itu, jam-jam padat menjadikan kemacetan semakin tak terbendung.

“Jembatan yang sebelumnya



Proyek pelebaran jembatan di Raya Trosobo, lalu lintas jadi macet.

hanya memiliki lebar sekitar dua meter, kini akan diperluas menjadi enam meter guna mendukung kelancaran arus lalu lintas di jalur utama penghubung Surabaya menuju Mojokerto dan sekitarnya,” ujar Kanit Lantas Polsek Taman, Iptu Hari Nurcahyo, Kamis (11/9).

Selama proyek berlangsung, arus kendaraan dari Surabaya menuju Mojokerto dialihkan ke jalur berlawanan arah (Mojokerto–Surabaya). Jalur itu dibagi menjadi dua lajur sehingga kendaraan dari arah Surabaya dan Mojokerto tetap bisa bergerak meski bergantian.

“Arus dari arah Surabaya kami belokkan ke kanan menuju jalur Mojokerto–Surabaya. Setelah melewati jembatan, kendaraan dikembalikan lagi ke jalurnya. Rekayasa ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan kontraktor pelaksana,” ujarnya.

Untuk mengurangi kepadatan, polisi bersama Dishub telah menyiapkan rambu peringatan, banner imbauan, serta jalur alternatif di titik-titik strategis seperti Bundaran Waru dan simpang empat Bypass Krian. Petugas pun disiagakan selama 24 jam penuh. (cat/rus)

YPM Sepanjang Salurkan Bantuan untuk Palestina Rp 90 Juta

SIDOARJO - Keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif (YPM) Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Dana yang berhasil dikumpulkan melalui gerakan donasi bersama itu mencapai Rp 90 juta.

Ketua YPM Sepanjang, Ir. H. Ahmad Makki, MT., menyampaikan bahwa penggalangan dana dilakukan serentak oleh 21 lembaga pendidikan di bawah naungan YPM. Donasi tersebut berasal dari guru, siswa, mahasiswa, hingga dosen.

"Alhamdulillah, dana terkumpul Rp 90 juta. Dana tersebut kami salurkan ke NU-Care Lazisnu. Dan menurut informasi,

pada bulan September ini akan disalurkan langsung oleh Lazisnu ke Palestina," ujar Gus Makki, Kamis (11/9/25).

Ia menambahkan, aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar YPM terhadap sesama, khususnya rakyat Palestina.

"Semoga persaudaraan dan kepedulian dengan sesama semakin kuat, khususnya di keluarga besar YPM," tegasnya.

Sebagai informasi, YPM Sepanjang menaungi berbagai lembaga pendidikan, mulai dari Playgroup, TK, SD, SMP-MTs, SMA-SMK, hingga perguruan tinggi Universitas Ma'arif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo. • Loe





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lansia di Sidoarjo Harus Diurus, Jangan Ada yang Terlantar

Sidoarjo, Bhirawa

Komda Lansia Kabupaten Sidoarjo kepengurusan 2025-2029 diharapkan bisa eksis. Bisa membantu Lansia Kabupaten Sidoarjo dari berbagai aspek kebutuhan. Demikian disampaikan penasihat Komda Lansia Sidoarjo, MG Hadi Sucipto, Kamis (11/9) kemarin, di Ruang Delta Karya Setda Sidoarjo, dalam

Rakor Komda Lansia Kabupaten dan Komda Lansia kecamatan.

Hadir dalam Rakor itu Pengurus Komda Lansia Sidoarjo periode 2025-2029 dan para Sekcam dari 18 kecamatan sebagai pembina Komda Lansia di tingkat kecamatan. Serta sejumlah OPD di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan masalah-

masalah Lansia. Komda Lansia kabupaten dan Komda Lansia kecamatan, diharapkan nantinya bisa membantu masalah Lansia Sidoarjo yang ada di 218 desa dan yang ada di 28 kelurahan.

Pria yang mengaku sudah berusia 70 tahun lebih ini, tidak ingin ada Lansia di Sidoarjo yang hi-

dupnya terlantar. Karena tidak ada keluarganya yang peduli lagi dengan nasib Lansia.

"Di Sidoarjo mungkin perlu ada panti jompo, ini peranan Dinkes yang memikirkan, Lansia di Sidoarjo perlu diurus," komentarnya.

Penasehat II Komda Lansia Sidoarjo, Wahyu Suhantiyo, yang

kini sudah berusia 85 tahun, ingin Komda Lansia di kecamatan bisa perhatian kepada Lansia-lansia yang berada di wilayahnya.

"Saya ingin tahun 2026 nanti, ada lomba-lomba dari Komda Lansia kecamatan dalam upayanya perhatian kepada Lansia yang berada di wilayahnya," kata Wahyu

yang pensiunan PNS di Pemkab Sidoarjo itu.

Komda Lansia Kabupaten dan Komda Lansia Kecamatan, kata Wahyu, harus kompak dalam mengurus Lansia, supaya usia harapan hidup (UHH) para Lansia di Sidoarjo tinggi dan sejahtera. [kus.fen]

HARIAN
Bhirawa

Media Online Sidoarjo

Belanja Daerah Naik Jadi Rp 6,06 Triliun

SIDOARJO-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 2025 resmi mengalami perubahan. Pendapatan daerah naik dari Rp 5.428 triliun menjadi Rp 5.448 triliun, sedangkan belanja daerah bertambah dari Rp 5.947 triliun menjadi Rp 6.066 triliun.

"Semoga kita semua bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah hingga akhir tahun 2025 secara maksimal dan merata demi masyarakat Sidoarjo yang berkeadilan," ucap Bupati Sidoarjo, Subandi

● Ke Halaman 10



M. SAIFUL ROHMAN/RADAR SIDOARJO

NAIK: Bupati Sidoarjo, Subandi saat mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Sidoarjo



Sambungan

Belanja Daerah Naik...

dalam sambutannya, Kamis (11/9).

Dia menjelaskan, penetapan raperda perubahan APBD 2025 sudah dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme. Raperda tersebut selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.

"Raporan tentang perubahan APBD pada tahun anggaran 2025 akan kami sampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah tentu kita semua berharap akhir hasil evaluasi dapat diselesaikan dengan cermat," jelasnya.

Selain pendapatan dan belanja, Sub-

andi juga menyinggung soal pembiayaan daerah. Menurutnya, detail anggaran pembiayaan akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah provinsi.

Subandi mengaku, akan fokus menuntaskan program-program prioritas yang sudah direncanakan. Upaya itu sekaligus untuk memuli-

hkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Di hadapan anggota dewan, Subandi menyampaikan apresiasi atas kerja sama selama proses pembahasan.

"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan dan setingginya kepada saudara pimpinan dan seluruh anggota

Dewan yang terhormat serta semua pihak yang terlibat," tuturnya.

Subandi berharap sinergi eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik.

"Kebersamaan ini menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju," pungkasnya. (sai/gun)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



IST/RADAR SURABAYA

DARURAT: Penanganan tim medis PSC 119 Dinkes Sidoarjo.

PSC 119 Sidoarjo Terima 1.705 Panggilan Darurat

SIDOARJO - Selama enam bulan terakhir, Public Safety Center (PSC) 119 Sidoarjo menerima 1.705 panggilan darurat dari masyarakat. Laporan didominasi permintaan penanganan laka lantas hingga ada puluhan telfon prank.

Kepala Koordinator PSC 119 Sidoarjo, Ayu Mufidah mengatakan untuk laporan penanganan laka ada mendominasi dengan jum-

lah mencapai 641 laporan.

"Ini menunjukkan tingginya angka kecelakaan di Sidoarjo yang membutuhkan penanganan cepat dari tim PSC," ucapnya, Kamis (11/9).

Selain laka ada laporan penanganan penurunan kesadaran, hingga konsultasi kesehatan seperti KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan hipertensi.

● Ke Halaman 10



PSC 119 Sidoarjo...

Menurutnya selain laporan pertolongan darurat, belakangan muncul pola baru prank call dari Pinjaman

Online (pinjol).

Ayu menjelaskan bahwa beberapa kali petugas mendapatkan laporan darurat palsu. Tetapi saat tim datang, kondisi lapangan nihil. "Salah satunya

ada yang laporan keracunan massal, ia lengkap dengan share lokasi dan foto. Saat ditelusuri, ternyata hanya jebakan untuk mengarahkan petugas ke rumah debitur pinjol," imbuhnya.

PSC 119 Sidoarjo mencatat setidaknya ada 39 telepon prank yang masuk dalam enam bulan terakhir. Petugas berharap masyarakat semakin bijak menggunakan layanan daru-

rat kedepannya.

"Layanan darurat ini untuk keselamatan nyawa, kami harap masyarakat lebih bijak saat menggunakannya," pungkasnya. (sai/gun)





MACET: Polisi melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Trosobo, Taman, Sidoarjo, Kamis (11/9).

Padat, Polisi Lakukan Rekayasa Jalan

TAMAN-Proyek pelebaran jembatan di Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo, membuat arus lalu lintas Surabaya-Mojokerto dan sebaliknya tersendat parah. Setiap hari, antrian kendaraan mengular panjang, terutama saat jam sibuk. Untuk mengurangi kepadatan, Unit Lantas Polsek Taman menerapkan pola rekayasa lalu lintas.

Jembatan yang berada di sisi barat Flyover Trosobo itu kini tengah direnovasi dan ditargetkan rampung pada Jumat (28/11). Lebar jembatan yang semula hanya sekitar dua meter akan diperluas menjadi enam meter agar lebih layak menampung volume kendaraan yang padat setiap harinya.

"Jalan Raya Trosobo terpantau tidak bergerak, dari tadi macet," kata pengendara motor, Budi, Kamis (11/9).

Kemacetan mengular, baik dari arah Surabaya maupun Mojokerto. Meskipun ia sudah berangkat untuk bekerja lebih awal, namun tetap terjebak kemacetan di kawasan Trosobo, Taman. Selain itu, jam-jam padat menjadikan kemacetan semakin tak terbendung.

"Jembatan yang sebelumnya hanya memiliki lebar sekitar dua meter, kini akan diperluas menjadi enam meter guna mendukung kelancaran arus lalu lintas di jalur utama penghubung Surabaya menuju Mojokerto dan sekitarnya," ujar Kanit Lantas

● Ke Halaman 10



Padat, Polisi Lakukan...

Polsek Taman, Iptu Hari Nurcahyo, Kamis (11/9).

Selama proyek berlangsung, arus kendaraan dari Surabaya menuju Mojokerto dialihkan ke jalur berlawanan arah (Mojokerto–Surabaya). Jalur itu dibagi menjadi dua lajur sehingga kendaraan dari arah Surabaya dan Mojokerto tetap bisa bergerak meski bergantian.

“Arus dari arah Surabaya kami be-

lokkan ke kanan menuju jalur Mojokerto–Surabaya. Setelah melewati jembatan, kendaraan dikembalikan lagi ke jalurnya. Rekayasa ini sudah kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan kontraktor pelaksana,” ujarnya.

Untuk mengurangi kepadatan, polisi bersama Dishub telah menyiapkan rambu peringatan, banner imbauan, serta jalur alternatif di titik-titik strategis seperti Bundaran Waru dan simpang empat Bypass Krian. Petugas

pun disiagakan selama 24 jam penuh.

“Kami harap masyarakat bisa memahami dan bersabar selama proses pelebaran berlangsung. Ini demi kepentingan bersama agar jalur ini lebih aman dan nyaman ke depannya,” tandasnya.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari jalur ini dan memilih rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan. **(dik/gun)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Siapkan Sumur Bor, Sidoarjo Relatif Aman

Antisipasi Kekeringan

RADAR SIDOARJO- Tahun lalu, kekeringan di Kecamatan Tarik, terutama Desa Segodobacang menjadi perhatian pemerintah. Lokasi desa yang jauh dari sumber irigasi membuat sawah sulit teraliri air.

Memasuki musim kemarau tahun ini, kekeringan kembali terasa di sejumlah daerah. Pemprov Ja-

tim menyiapkan langkah antisipasi terutama agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyediaan sumur bor, pipanisasi hingga pengiriman air dengan tangki terus dilakukan. Menurutnya, kebutuhan air di beberapa wilayah meningkat signifikan dibanding sebelumnya.

“Sumur bor kita terus

berjalan, pipanisasi juga berjalan, kemudian pengiriman air dengan tangki juga berjalan,” ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo usai pasar murah di Gedangan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penghijauan untuk menjaga ketersediaan sumber air. Salah satunya melalui program penanaman pohon yang dilakukan

● Ke Halaman 10



Siapkan Sumur Bor,...

bersama TNI AU dan Perhutani.

“Budaya menanam harus melekat di masyarakat, dengan kebersamaan, kelestarian alam Jawa Timur diyakini bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Tarik Heri Subagia menjelaskan, warga di Kecamatan Tarik sejauh ini tidak mengalami kekurangan air bersih. Untuk kebutuhan pertanian, sudah ada beberapa titik pengeboran sumur yang di-

manfaatkan petani.

“Kalau warga nggak ada kekurangan air, kalau sawah itu kemarin kan sudah ada beberapa titik pengeboran sumur-sumur itu,” terangnya kepada Radar Sidoarjo, Kamis (11/9).

Dia menambahkan, tahun ini kekeringan tidak separah sebelumnya. Hujan yang turun merata membuat kondisi lahan pertanian lebih terjaga.

“Kalau tahun ini kekeringan sih nggak terlalu, karena hujannya masih merata,” pungkasnya. (sai/gun)



Bupati Subandi Ajak Perkuat Sinergi



SELAMAT DATANG: Bupati Sidoarjo Subandi menyambut Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo.

SIDOARJO-Dandim 0816 Sidoarjo resmi berganti. Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo secara resmi digantikan oleh Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Acarapisah sambutan ini dihadiri oleh seluruh Forkopimda Sidoarjo tak terkecuali Bupati Sidoarjo Subandi.

Dalam sambutannya Bupati Sidoarjo Subandi mengucapkan selamat datang kepada Dandim 0816 Sidoarjo yang baru Letkol Czi Shobirin Setio Utomo. Ia berharap kedatangannya akan membawa energi baru

untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

"Harapan kami kerja sama yang baik selama ini dapat semakin ditingkatkan sehingga bersama kita mampu menjaga kondusifitas wilayah serta mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang lebih maju, aman, dan sejahtera,"ucapnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap menyambut Letkol Czi Shobirin Setio Utomo dengan tangan

terbuka. Ia berharap kolaborasi dan sinergi Forkopimda Sidoarjo yang terjalin baik selama ini dapat terus terjaga.

"Kami siap menyambut dengan tangan terbuka untuk berkolaborasi demi Kabupaten Sidoarjo yang semain baik dan bermartabat,"ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo atas pengabdianya sela-

ma ini bagi Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya dedikasi yang tinggi telah ditunjukkan Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo bagi kemajuan pembangunan Sidoarjo.

"Selama bertugas di Sidoarjo, beliau telah banyak berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban untuk mendukung program pembangunan daerah,"ucapnya. (Git/mas)

KEAKSAAN NEGERI SIDOARJO
SESUUTUKAN DENGAN KEBERHAASAN
"Demi Keadilan dan Kebenaran
Bersihkan Kabupaten yang Maha Esa"

PENGUMUMAN
SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ASSET

RADAR
SIDOARJO.ID

Warga Keluhkan Parkir Tanpa Karcis di Pasar Sepanjang

Disperindag
Temukan
Bukti Pungli

SIDOARJO - Pengelolaan parkir di Pasar Sepanjang, Taman, menuai keluhan warga. Sejumlah aduan masuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo. Mulai dari petugas parkir tanpa seragam dan karcis, hingga penempatan kendaraan di area yang tidak semestinya.

Kabid Pasar Disperindag Sulton Hasan mengatakan, aduan masyarakat diterima lewat media sosial Bupati Sidoarjo. "Kami dalam, dan benar ada bukti pungutan liar serta pengelolaan parkir yang tidak sesuai standar,"



ANGGER BONDAN/JAWA POS

GANGGU KENYAMANAN: Area parkir kendaraan bermotor di Pasar Sepanjang kemarin (11/9). Warga melaporkan penataan parkir yang tidak sesuai standar.

katanya, kemarin.

Menurut Sulton, salah satu keluhan warga adalah adanya parkir di akses pintu masuk pasar. Kondisi itu mengganggu aktivitas keluar-masuk pengunjung. "Semua keluhan sudah kami tampung. Bahkan ada foto-foto yang dikirim

pelapor sehingga lebih mudah diidentifikasi," jelasnya.

Untuk menindaklanjuti, Disperindag sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo. Dishub dan Disperindag akan turun langsung memberikan sosialisasi penataan parkir di sana.



Kami dapati memang ada bukti parkir di sana tidak sesuai standar. Kami tindak lanjuti."

Sulton Hasan
Kabid Pasar
Disperindag Sidoarjo

Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara menambahkan, pihaknya masih meninjau lokasi. "Kami cek, sambil sosialisasi. Semua data keluhan sedang kami kumpulkan," tandasnya. (eza/uzi)

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bernatokan Hasil Konsultasi, Bupati dan Pimpinan DPRD Sidoarjo Sepakat Sahkan Perda P-APBD 2025



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati dan pimpinan DPRD Sidoarjo akhirnya mengesahkan Raperda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Tahun 2025 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/09/2025) sore. Para pimpinan eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) Sidoarjo menyepakati pengesahan Raperda P APBD Tahun 2025 tidak ada polemik dan persoalan lantaran sudah dikonsultasikan ke Pemprov Jatim dan Kemendagri. Meski belum jelas rekomendasi dari hasil konsultasi ke kedua lembaga pembinaan jalannya pemerintahan Kabupaten/Kota itu.

Pengesahan Raperda P APBD ini, maka bisa dipastikan terdapat dua draf soal APBD Pemkab Sidoarjo yang dikirim ke Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk dikonsultasikan. Yakni pertama draf Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikirim eksekutif Pemkab Sidoarjo ke Gubernur Jatim lantaran penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2024 berapa bulan lalu. Kini, juga terdapat P APBD Tahun 2025 yang disahkan dan juga bakal dikirim k Gubernur Jatim untuk dievaluasi dan dikoreksi.

Berdasarkan datanya, pasca anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo menolak LPP APBD Tahun 2024, Bupati Sidoarjo Subandi langsung mengeluarkan Perkada di bulan Juli 2025 kemarin.

Dalam rapat paripurna pengesahan Perda PAK APBD 2025 itu, dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama tiga Wakil Ketua diantaranya Suyarno (PDI Perjuangan), Kayan (Partai

Gerindra) dan Warih Andono (Partai Golkar). Sedangkan dalam paripurna itu dihadiri 41 anggota DPRD dan Bupati Sidoarjo, Subandi bersama perwakilan para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan Forkopimda serta organisasi vertikal lainnya.

Bupati Sidoarjo, Subandi dalam sambutannya menyebutkan terdapat tambahan anggaran pada PAK APBD Tahun 2025 sekitar Rp 100 miliar. Selain itu, Subandi menjelaskan dengan pengesahan Perda PAK APBD Tahun 2025 menunjukkan hubungan legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemkab) Sidoarjo berjalan kompak dan harmonis.

"Dengan adanya PAK APBD 2025 ini, kita berkomitmen untuk meningkatkan program pembangunan sesuai harapan dan keinginan masyarakat (rakyat). Nanti secepatnya Perda PAK APBD 2025 ini, segera kita ajukan ke Gubernur Jatim untuk dievaluasi," kata Subandi usai rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo.

Bupati Ajak Perkuat Sinergi Antar Lembaga saat Letkol Czi Shobirin Setio Utomo Mulai Jabat Dandim 0816 Sidoarjo

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan sejumlah langkah dan tahapan yang sudah dilakukan DPRD dan Pemkab Sidoarjo dalam membahas PAK APBD Tahun 2025 itu sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada.

"Kita juga sudah konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov Jatim, hasilnya tidak masalah mengesahkan Perda PAK APBD Tahun 2025 ini. Sekarang kita tinggal menunggu hasil evaluasi dari Pemprov Jatim apa yang harus disesuaikan. Apa pun hasilnya nanti akan kita ikuti saja," pungkasnya. Ary/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD dan Bupati Sidoarjo Kompak Sahkan Perda PAK 2025



SIDOARJO — DPRD Sidoarjo bersama Bupati H. Subandi akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9/2025), dan dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih serta dihadiri kepala OPD, Dandim 0816 Ketua BNNK serta sejumlah pejabat terkait.

Keputusan ini menjadi akhir dari perdebatan panjang mengenai sah atau tidaknya Perda PAK 2025. Sebelumnya, muncul perbedaan pandangan lantaran Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 ditolak dewan sehingga hanya berbentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyebut pengesahan PAK ini sebagai langkah penting untuk memastikan pembangunan tidak tersendat.

“Semua sudah berjalan dan sudah ditandatangani. Dalam tiga hari ke depan, dokumen ini akan kami serahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi,” ujarnya.

Menurutnya, Gubernur memiliki waktu 15 hari untuk memberikan catatan. Jika ada koreksi, DPRD dan Pemkab Sidoarjo siap melakukan penyesuaian. “Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov. Prinsipnya boleh dilanjutkan agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tidak terhambat,” tegas Nasih.

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menambahkan bahwa pengesahan Perda PAK 2025 ini adalah bentuk komitmen bersama eksekutif dan legislatif.



“Selanjutnya kami serahkan ke Gubernur untuk evaluasi. Yang jelas, kepentingan masyarakat dan pembangunan harus tetap berjalan,” katanya.

Dalam Perubahan APBD 2025, belanja daerah naik Rp119 miliar, dari Rp5,947 triliun menjadi Rp6,066 triliun. Kenaikan tersebut diikuti tambahan pendapatan sekitar Rp48 miliar serta pembiayaan daerah yang meningkat menjadi Rp618 miliar.

Dengan pengesahan ini, DPRD dan Pemkab Sidoarjo menegaskan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hadiri Pelepasan Kontingen MTQ XXXI 2025, Ketua DPRD Sidoarjo Optimis Raih Juara Umum



SIDOARJO | B-news.id - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI Provinsi Jawa Timur tinggal menghitung hari. Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mendukung penuh kontingen (Kafilah) Sidoarjo yang berkompetisi di ajang tersebut.

Nasih juga mengatakan bahwa Kafilah Sidoarjo tidak bisa dipandang remeh bahkan optimis bisa meraih juara umum.

Dijelaskan, ajang MTQ XXXI adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Jember sebagai kafilah terbaik. "Kini saatnya kafilah Sidoarjo tunjukkan yang terbaik. Tunjukkan bahwa Sidoarjo hebat dan bisa merebut kembali sebagai juara umum yang pernah tiga kali berturut-turut." ucapnya saat menghadiri pelepasan 52 Kafilah dari Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Rabu (10/9/2025).

Nasih mengaku yakin bahwa kafilah Sidoarjo dapat meraih posisi terbaik dalam MTQ kali ini. Sebab, sebetulnya Sidoarjo memiliki banyak potensi sumber daya yang mumpuni. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola dan ditata dengan baik, serta digembleng dengan sungguh-sungguh. "Saya yakin jika kita sungguh-sungguh, kita bisa juara umum lagi," jelasnya.

MTQ tambah Nasih, tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan, melainkan juga sarana menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, memperkuat akhlak generasi muda, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam membangun masyarakat religius dan berakhlak mulia.

Prosesi pelepasan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Abridawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kepala Kemenag Sidoarjo Mufi Imron Rosyadi, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudhlori, serta Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Ainur Rahman. Sedangkan pelaksanaan MTQ XXXI Provinsi Jawa Timur akan digeber mulai tanggal 11 hingga 19 September 2025. (za)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab dan DPRD Kompak Sahkan PAK APBD 2025 di Tengah Perbedaan Sikap



HALOPOS.ID/SIDOARJO – Setelah sempat diwarnai dinamika politik pasca penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 oleh DPRD, akhirnya Bupati Sidoarjo Subandi dan legislatif mencapai titik temu. Raperda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 resmi disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama tiga wakil ketua, dihadiri 41 anggota dewan, serta Bupati Subandi. Meski sebelumnya hubungan eksekutif dan legislatif sempat renggang, sidang kali ini berjalan lancar dan penuh kehati-hatian.

Dalam paripurna tersebut, disepakati adanya tambahan anggaran sekitar Rp 100 miliar pada PAK APBD 2025. Anggaran tambahan itu akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Rp 45 miliar, peningkatan layanan kesehatan Rp 20 miliar, penguatan kualitas pendidikan Rp 15 miliar, serta dukungan program penanganan stunting dan kesejahteraan sosial Rp 10 miliar. Sisanya dialokasikan untuk penguatan belanja wajib serta kebutuhan darurat lainnya.

Subandi menyebut pengesahan perda ini menjadi bukti bahwa roda pemerintahan di Kota Delta tetap berjalan harmonis.

“Dengan adanya PAK APBD 2025, kita berkomitmen meningkatkan program pembangunan sesuai harapan masyarakat. Setelah ini, segera kita ajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi lanjutan,” ujar Subandi.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memastikan langkah pengesahan sudah sesuai prosedur. “Kita sudah konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov Jatim. Tidak ada masalah, tinggal menunggu hasil evaluasi dari Pemprov untuk penyempurnaan. Apa pun catatannya akan kita ikuti,” terangnya.

Sebelumnya, hubungan eksekutif dan legislatif di Sidoarjo sempat memanas setelah DPRD menolak LPP APBD 2024 yang diajukan bupati. Subandi lantas mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada Juli 2025 agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun dengan pengesahan PAK APBD 2025, tensi politik yang sempat meninggi kini mencair.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Inilah Pandangan Fraksi Gerindra Terhadap Raperda Tentang Penyelenggaraan UKS Madrasah



Liputan5news.com - Sidoarjo. DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat paripurna, di ruang rapat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kamis (11/9/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Suvarno ini, dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, 41 orang anggota DPRD kabupaten Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, perwakilan Kapolresta Sidoarjo, pimpinan partai politik, rektor, LSM dan wartawan.

Pada rapat ke VI yang dipimpin Wakil ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Suvarno disampaikan pandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Raperda tentang penyelenggaraan UKS Madrasah.

Penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi diwakili oleh fraksi Gerindra, yang dibacakan oleh juru bicara Irda Bella A.F., S.Ked.

Dalam pembacaannya Irda menyampaikan banyak terima kasih kepada Bupati Sidoarjo yang telah menyampaikan naskah akademik Raperda tentang penyelenggaraan UKS Madrasah. Kedua kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk membacakan pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terhadap Raperda tentang penyelenggaraan UKS Madrasah.

"Dalam kesempatan ini Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan tanggapan sebagai berikut Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik, yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat perlu pembinaan dan pengembangan. Berbagai usaha untuk mewujudkan sekolah atau Madrasah sehat di Kabupaten Sidoarjo melalui penyelenggaraan usaha kesehatan selain usaha kesehatan sekolah upaya untuk peningkatan derajat kesehatan perlu



dilakukan berbasis upaya kesehatan bersumber dari masyarakat khususnya pada pondok pesantren," jelasnya.

Lanjut Irda Bella penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah/ Madrasah dan pondok pesantren perlu dioptimalkan melalui Sinergi berbagai pemangku kepentingan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa peraturan daerah kabupaten tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1997 tentang usaha kesehatan sekolah di Kabupaten daerah tingkat II Sidoarjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.

"Pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap penyelenggaraan UKS Madrasah akan berisi tanggapan pertanyaan dan masukan dari masing-masing Fraksi mengenai Rancangan peraturan tersebut. Tujuannya untuk memberi persetujuan awal sebelum perancangan tersebut dibahas lebih lanjut dan memastikan tujuan dan substansi raperda sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga," ungkapnya.

Masih kata Irda Bella dengan ini fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan pandangan yang bersifat kritis beberapa diantaranya :

1.Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sangat mengapresiasi dengan adanya Raperda tentang penyelenggaraan UKS Madrasah karena Raperda tersebut merupakan landasan hukum untuk mengintegrasikan program kesehatan dan pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan prestasi belajar peserta Didik Madrasah secara optimal. Dasar hukum penyelenggaraan UKS/ Madrasah peraturan daerah mengenai usaha kesehatan sekolah di Madrasah belum ada secara spesifik tetapi penyelenggaraannya diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yaitu SKB 4 menteri dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2.Fraksi kami menanyakan apakah peraturan daerah di Sidoarjo secara spesifik mengatur UKS di madrasah atau merujuk pada peraturan pusat seperti SKB 4 menteri.

3.Fraksi kami memandang perlu untuk mencantumkan peraturan tentang kesehatan pondok pesantren tingkat MI hingga MTS

4.Serta mencantumkan pasal tentang standar toilet atau kamar mandi pondok pesantren karena masih banyak dijumpai toilet atau kamar mandi yang belum memenuhi kelayakan sarana toilet atau kamar mandi sekolah maupun Pesantren.

"Sidang paripurna dewan yang terhormat demikian pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sidoarjo dan catatan ini diharapkan bisa jadi referensi penting dalam rangka evaluasi dan hadirnya ragam kebijakan yang konstruktif dan responsif dalam gerak roda pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," pungkas Irda Bella.(Yanti)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD dan Bupati Sidoarjo Sepakat Sahkan Perda PAK APBD 2025, Pembangunan Dipastikan Berlanjut



Sidoarjo - News PATROLI.COM- Setelah melewati dinamika pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akhirnya mencapai kesepakatan penting. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, jajaran pimpinan DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Momentum ini menjadi titik akhir dari perdebatan panjang terkait sah atau tidaknya Perubahan APBD 2025. Sebelumnya, muncul keraguan karena Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 ditolak oleh dewan sehingga hanya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi itu sempat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pengesahan PAK 2025. Namun, melalui mekanisme pembahasan yang intensif, disertai konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akhirnya seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan. Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menegaskan bahwa pengesahan ini adalah langkah penting agar pembangunan di Sidoarjo tidak tersendat. "Semua sudah berjalan dan sudah ditandatangani. Dalam tiga hari ke depan, dokumen ini akan kami serahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi," ujarnya. Ia menjelaskan, Gubernur memiliki waktu maksimal 15 hari untuk memberikan catatan atau koreksi terhadap Perda PAK 2025. Jika terdapat catatan, DPRD dan Pemkab Sidoarjo siap menyesuaikan sesuai arahan. "Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov. Prinsipnya, boleh dilanjutkan agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tidak terhambat," tegas Nasih. Senada dengan itu, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyambut baik pengesahan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, Perda PAK 2025 menjadi instrumen penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan. "Selanjutnya kami serahkan ke Gubernur untuk evaluasi. Yang jelas, kepentingan masyarakat dan pembangunan harus tetap berjalan," ungkap Subandi. Dalam Perubahan APBD 2025 ini, terjadi peningkatan pada sisi belanja daerah. Anggaran belanja naik sebesar Rp119 miliar, dari semula Rp5,947 triliun menjadi Rp6,066 triliun. Kenaikan belanja tersebut didukung tambahan pendapatan daerah sebesar Rp48 miliar serta peningkatan pembiayaan daerah yang mencapai Rp618 miliar. Penambahan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan



masvarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memastikan tambahan anggaran benar-benar menyetuntuh kepentingan rakyat. Penguatan belanja daerah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berusaha maksimal menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. DPRD bersama Pemkab Sidoarjo bersepakat bahwa setiap rupiah anggaran harus digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Pengesahan Perda PAK 2025 ini juga menjadi sinyal positif bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif di Sidoarjo tetap terialin. Meskipun sempat terjadi dinamika politik terkait penolakan LPP APBD 2024, namun kedua belah pihak pada akhirnya mampu mengedepankan kepentingan publik di atas segala perbedaan. Dengan disahkannya Perda PAK 2025, DPRD dan Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmen mereka: pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena persoalan administratif. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kini, masyarakat menaruh harapan besar agar kebijakan anggaran yang baru saja disahkan ini benar-benar dapat diwujudkan dalam program nyata. Pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat dalam merealisasikan anggaran, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat luas. Ke depan, DPRD dan Pemkab Sidoarjo berjanji akan terus menjaga transparansi, meningkatkan pengawasan, dan membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembangunan. Dengan begitu, Perubahan APBD 2025 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi juga instrumen nyata untuk mewujudkan Sidoarjo yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Gus)

Setelah melewati dinamika pembahasan yang cukup panjang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akhirnya mencapai kesepakatan penting. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pengesahan itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih dan dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, jajaran pimpinan DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sidoarjo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Momentum ini menjadi titik akhir dari perdebatan panjang terkait sah atau tidaknya Perubahan APBD 2025. Sebelumnya, muncul keraguan karena Laporan Pertanggungjawaban (LPP) APBD 2024 ditolak oleh dewan sehingga hanya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi itu sempat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pengesahan PAK 2025.

Namun, melalui mekanisme pembahasan yang intensif disertai konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akhirnya seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan proses pengesahan.

Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menegaskan bahwa pengesahan ini adalah langkah penting agar pembangunan di Sidoarjo tidak tersendat. "Semua sudah berjalan dan sudah ditandatangani. Dalam tiga hari ke depan, dokumen ini akan kami serahkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, Gubernur memiliki waktu maksimal 15 hari untuk memberikan catatan atau koreksi terhadap Perda PAK 2025. Jika terdapat catatan, DPRD dan Pemkab Sidoarjo siap menyesuaikan sesuai arahan. "Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov. Prinsipnya, boleh dilaniutkan agar pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tidak terhambat," tegas Nasih.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

JALUR ALTERNATIF: Box culvert rusak di pertigaan Jalan Durian, Geluran, Taman, menyebabkan kemacetan kemarin (11/9). Warga berharap segera dilakukan perbaikan agar lalu lintas kembali lancar.

Jalan Durian di Desa Geluran Jebol

Bikin Macet, Mobil Harus lewat Bergantian

SIDOARJO - Pertigaan Jalan Durian dan Jalan Imam Bonjol di Desa Geluran, Taman, berlubang. Saluran drainase yang melintasi jalan itu ambrol hingga menyebabkan macet.

"Lubangnya sudah tiga bulan. Diberi

penanda oleh warga biar pengendara aman," ujar Wikan, salah satu warga sekitar. Lubang *crossing* drainase tersebut jebol dengan ukuran sekitar 60 sentimeter.

Akibat lubang tersebut, jalan hanya bisa dilewati mobil secara bergantian. "Kalau sore atau pagi macet di sini. Padahal ini jalur alternatif Taman ke Sidoarjo kota," katanya. (eza/uzi)